BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengendalian Intern

2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013:159), menyatakan bahwa definisi Pengendalian Intern sebagai berikut:

> "Pengendalian intern adalah kebijakan atau prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan(peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan".

Sedangkan menurut Anggreini (2012:10) menyatakan bahwa definisi Pengendalian Intern adalah:

> "Pengendalian intern merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja".

Menurut Azhar Susanto (2013:95) menyatakan bahwa definisi Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

> "Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui efektivitas dan efisiensi operasi, penyajian laporan keuangan dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku".

Dan Menurut Valery G. Kumaat (2011:15) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut:

> "Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang)." Kehandalan laporan keuangan, Kepatuhan pada hukum dan regulasi yang berlaku".

Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Dengan kata lain pengendalian intern dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern secara ketat maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Bahkan tidak hanya dari segi operasional saja yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial juga dapat lebih termonitor dengan baik.

2.1.1.2 Indikator Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013:90) indikator pengendalian interen meliputi :

1) Kebijakan
2) Melindungi Aset
3) Penyalahgunaan
4) Informasi
5) Akurat
6) Ketentuan Undang-undang

2.1.1.3 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013:160) tujuan pengendalian intern tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa :

1. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
3. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

2.1.2 Kompetensi Aparatur

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur

Menurut Wibowo (2012:324), menyatakan bahwa definisi kompetensi aparatur adalah:

"Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut".

Sedangkan menurut Moeheriono (2015:5), mengemukan bahwa kompetensi aparatur adalah:

"Merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, sikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertrntu".

Menurut Narawi dalam Chr. Jimmy L.Gaol (2015:44) menyatakan bahwa:

> "Kompetensi aparatur adalah manusia yang bekerja di suatu organisasi (disebut juga personal tenaga kerja, atau karyawan), yang melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut".

Sedangkan menurut Aruan dalam Yani Sukriah Siregar (2016), menyatakan bahwa kompetensi aparatur adalah:

> "Kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya".

Berdasarkan keempat definisi di atas, kompetensi aparatur adalah suatu karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

2.1.2.2 Indikator Kompetensi Aparatur

Adapun yang menjadi indikator kompetensi aparatur menurut Wibowo (2012:320), yaitu:

1) Pengetahuan

2) Keterampilan

3) Perilaku

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina, dkk (2015:19) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

> "Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya".

Sedangkan menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:26), menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

> "Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan oprasional pemerintah daerah".

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2010:13), menyatakan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

> "Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya".

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat di katakana bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Erlina, dkk (2015:8), yaitu:

1) Andal
2) Relevan
3) Dapat dipahami
4) Dapat dibandingkan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mulyadi (2010:19) :

> "Mengkaitkan tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian intern yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawban dan perlindungan kekayaan perusahaan".

Menurut Mahmudi (2007:27) :

> "Menyatakan terdapat hubungan terkait antara Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang pengendalian intern, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Sedangkan menurut Hall (2007:182) mengemukakan bahwa :

> "fungsi dari pengendalian intern yaitu sebagai pelindung yang melindungi asset perusahaan dari banyaknya peristiwa yang tidak di inginkan".

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern yang baik dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya Yusup Komarudin (2014), menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini membuktikan bahwa jika pengendalian intern dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

As Syifa Nurillah, Dul Muid ISSN: 2337-3806 (2014) dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengendalian intern memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,220 dengan signifikansi kurang dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi.

Kemudian menurut Harlinda ISSN: 1907-364x (2016), menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi diterapkan untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut M. Yusuf (2013:154), mengemukakan bahwa :

> "Ada terdapat hubungan terkait antara kompetensi aparatur dan kualitas laporan pemerintah daerah, jadi apabila tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah atau tidak bisa memberikan pelayanan perizinan dengan baik itu karena pegawainya kurang kompeten".

Menurut Abdul Hafiz (2014:6), menyatakan bahwa :

> "Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI, dan nyata dihadapi banyak instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah kelangkaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan negara/daerah".

Sedangkan Mardiasmo (2002:146), mengemukakan bahwa :

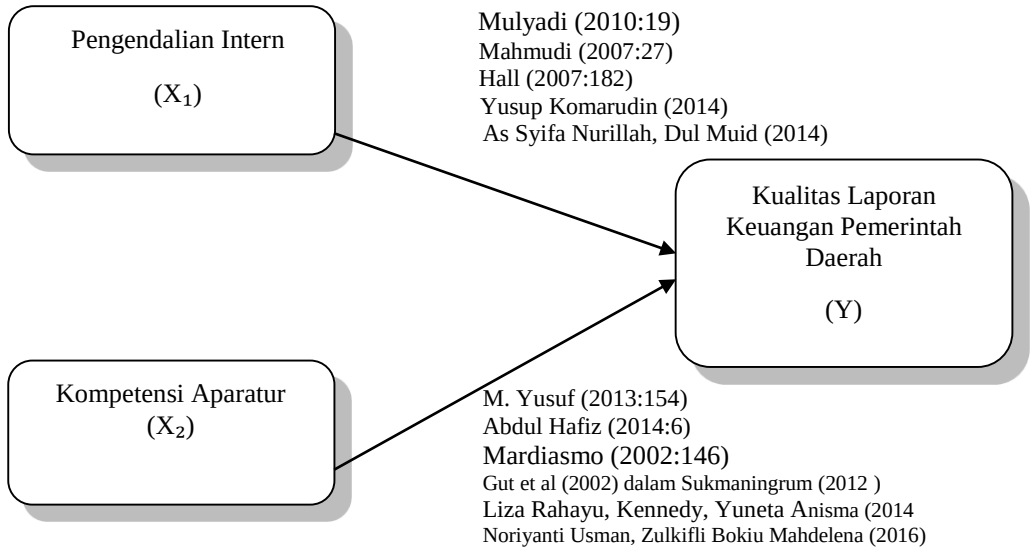
> "Sumber daya aparatur telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya, semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan".

Guy et al. (2002) dalam Sukmaningrum (2012), menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnnya, kompetensi aparatur yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya Liza Rahayu, Kennedy, Yuneita Anisma (2014), menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota pekanbaru.

Novriyanti Usman, Zulkifli Bokiu, Mahdalena (2013), menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada DPPKAD Kabupaten Bone Balango dan pengaruhnya bersifat positif, semakin baik kompetensi yang dimiliki aparatur maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan.

2.2.3 Bagan Paradigma Pemikiran



Gambar 2.1
Pradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:99) Hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik ".

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka, perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka dalam penelitian ini dapat di-rumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

H_1: Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2: Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.